1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Tanggal:

	00*** .																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Suara	Jateng Pos	Jawa Pos	Media	Wawasan
17	18	ιď		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Merdeka	Julicing 1 03	3awa 1 03	Indonesia	wawasan
1	10	1	ك				ļ- ·						50	<i>3</i> 1		Tribun	Danielilia	V	Cala Das	Media
																Jateng	Republika	Kompas	Solo Pos	Online

Wilayah Berita: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 1 dan 7

Defisit Anggaran BPJS Perlu Audit Independen

SEMARANG- Kebijakan pemerintah menutup defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan cukai tembakau dinilai langkah tepat. Namun, pemerintah selayaknya melihat defisit BPJS sebagai persoalan yang bersifat multikompleks. Adapun salah satu instrumen yang tepat untuk mengurai defisit dengan segera ialah melakukan audit independen. Audit bisa dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Peran utama audit adalah mencari solusi jangka panjang. Saya rasa, hal ini (audit) kurang dipikirkan pemerintah," kata Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Muhammad Junaidi di Semarang, Rabu (19/9).

Bukan hanya cukai, pajak yang berdampak pada kesehatan masyarakat seperti minuman beralkohol juga harus diarahkan untuk meminimalisasi defisit. Kebijakan lain ialah mengarahkan objek atau masyarakat, baik pekerja sektor formal maupun informal untuk kerja sama dengan BPJS.

Defisit...

(Sambungan Hal 1)

Hal ini penting mengingat nilainilai yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24/2011 tentang BPJS menempatkan prinsip gotong royong di awal konsideran UU. Pemerintah tidak bisa disalahkan secara keseluruhan, tapi tingkat kesadaran pengguna badan penyelenggara itu untuk membayar iuran secara teratur menjadi satu faktor penentu kebijakan BPJS dapat terlaksana dengan baik. Di sisi lain, badan penyelenggara itu juga harus mencari sektor-sektor yang belum terjamah program kesehatan seperti halnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Pelaku UMKM belum dibidik secara maksimal, salah satu upayanya dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan. Ini berlaku jika semua pekerjanya mengikuti BPJS," ungkapnya.

Junaidi menegaskan, hukuman tegas juga perlu diberikan kepada penunggak BPJS. Jika tidak segera membayar denda dan tanggungan, bisa saja diberikan sanksi tak mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan akan menutup defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan dana cukai rokok Rp 1,48 triliun dan dana cadangan APBN Rp 4,993 triliun. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden (perpres) terkait pemanfaatan cukai rokok dari daerah untuk BPJS tersebut. Presiden juga telah memerintahkan Kementerian Keuangan untuk mencairkan dana cadangan APBN Rp 4,993 triliun untuk BPJS Kesehatan. Dana APBN kini tengah diproses dan paling lambat dicairkan pekan depan.

Untuk meningkatkan peran Pemda, juga dimanfaatkan dana pajak rokok. Pemanfaatan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam Perpres, kewenangan diberikan kepada Kementerian Keuangan untuk memotong langsung pajak rokok yang akan diserahkan kepada daerah. Namun yang dipotong adalah pajak dari Pemerintah Daerah yang menunggak.

Pengamat ekonomi Undip Nugroho SBM mengungkapkan, pemanfaatan cukai rokok memang akan sedikit menganggu pendapatan asli daerah (PAD) daerah-daerah penghasil rokok yang mendapat bagi hasil cukai rokok

"Tapi ini kan tidak semua daerah dan tidak semua pendapatan cukai rokok digunakan untuk menutup defisit BPJS kesehatan," jelas Nugroho.

Menurutnya, langkah yang tepat untuk melakukan efisiensi adalah mengurangi jenis penyakit yang ditanggung. Saat awal mulai diberlakukan, banyak yang menilai BPJ-kesehatan sebagai asuransi yang paling ambisius di dunia karena menanggung begitu banyak asuransi kesehatan. Ke depan, selain mengurangi jenis penyakit yang ditanggung, BPJS Kesehatan juga harus melakukan efisiensi tenaga kerja dengan berbagai cara.

"Gaji pegawai yang besar perlu efisiensi entah dengan memotong tunjangan atau bahkan mengurangi pegawai," terangnya.

Ditambahkan, langkah lain untuk ofisiensi bisa dengan meniru Dana Pensiun yang memutar uang dengan menginvestasikan ke berbagai produk keuangan, seperti misalnya reksadana serta melakukan pinjaman ke bank karena "bisnis" BPJS dari kacamata perbankan dinilai sangat menguntungkan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jawa Tengah, Ihwan Sudrajat, mengungkapkan, rencana pemanfaatan cukai rokok dari daerah untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan bisa memengaruhi kapasitas fiskal daerah.

Ihwan Sudrajat mengatakan, kontribusi pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 18%. Dana itu akan didistribusikan 30% ke provinsi dan 70% ke kabupaten/kota. Dengan Perpres mengenai pemanfaatan cukai rokok dari daerah tersebut, dana akan berkurang sekitar 6%. Saat ini perkiraan pajak rokok di Jawa Tengah adalah Rp 2 triliun. Cukai yang diterima untuk mendukung program-program pembangunan di provinsi dan kabupaten tinggal Rp 1,26 triliun dan sekitar Rp 740 miliar dialihkan untuk menutup BPJS. Tentunya hal ini akan berdampak negatif pada kapasitas fiskal Jawa Tengah.

"Nilai Rp 740 miliar itu untuk satu tahun, kalau diberlakukan mulai Oktober ada sekitar Rp 140 miliar- Rp 150 miliar," ujar Ihwan.

Ihwan menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat petunjuk pemberlakuan dan mekanisme distribusinya. Namun yang perlu menjadi perhatian, berdasarkan UU Nomor 28/2009 pajak rokok adalah pajak daerah, selain Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Air Permukaan.

"Dari ketentuan tersebut, tentu mekanisme pembayaran tidak bisa dipotong begitu saja oleh pusat, harus diatur dengan Peraturan Gubernur," jelasnya. (J17,J14-31)